

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi pasar signifikan dari sisi ketersediaan tenaga kerja. Dalam hal pembangunan ekonomi, aspek ketenagakerjaan bersifat mendasar karena mencerminkan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap angkatan kerja. Dalam tingkat provinsi, keadaan ketenagakerjaan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan, melainkan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Berdasarkan teori *Neoclassical Labor Market Theory*, keseimbangan pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja melalui mekanisme harga. Dalam pandangan ini pasar tenaga kerja dianggap bersifat bebas dan terbuka, di mana pekerja maupun pengusaha dapat memiliki informasi yang lengkap terkait kondisi upah dan kesempatan kerja yang ada. Menurut teori ini, pengangguran yang terjadi bersifat sukarela, pekerja memilih tidak bekerja pada tingkat upah tertentu. Teori ini juga menekankan pentingnya mobilitas tenaga kerja dan keseragaman informasi dalam menjaga efisiensi pasar. Ketika mobilitas pasar

² Rita Rostika, Ahmad Rizal, and Izza M. Apriliani, *Perspektif Peran Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan* (Sumedang: Unpad Press, 2018), 48.

tenaga kerja ini rendah atau terjadi perbedaan keterampilan skill antar pekerja, maka akan terjadi ketidakseimbangan di pasar kerja sehingga memperbesar pengangguran. Selain itu, penurunan upah juga melemahkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menekan permintaan barang dan menyebabkan produsen merugi sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja.³

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum juga memperolehnya.⁴ Fenomena pengangguran yang sering terjadi tidak hanya pada tingkat nasional saja, melainkan di tingkat regional juga. Kondisi ini merupakan permasalahan serius yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diatasi melalui langkah-langkah strategis dan sistematis.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan. Pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan.⁵ Konsep pengangguran tidak hanya mencakup orang yang sama sekali tidak bekerja, melainkan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu, waktu (jam kerja yang kurang), intensitas

³ Eryan Okky Tegar Adinda and Kiky Asmara, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Gresik," *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (July 2024): 6–11, <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i2.14379>.

⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi*, 2nd ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 15.

⁵ Alfinatus Suroya and Rendra Erdkhadifa, "Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK dan BI)* 6, no. 1 (2023): 192, <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i1.793>.

pekerjaan (pekerjaan yang tidak penuh), dan produktivitas (kontribusi kerja yang rendah).⁶

Indikator ketenagakerjaan memegang peran yang penting dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang digunakan dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persediaan (*supply*) tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.⁷ Semakin tinggi nilai tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa semakin besar pula proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja.

Pengangguran terbuka merupakan keadaan seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.⁸ Adanya pengangguran terbuka ini disebabkan ketika kesempatan kerja yang tidak memadai dan kualifikasi tenaga kerja tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia.⁹ Permasalahan pengangguran terbuka menjadi tantangan bagi Provinsi Jawa Barat karena dapat dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan. Apabila pengangguran terbuka tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kondisi ketidakstabilan dalam aspek sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka

⁶ Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), 220.

⁷ Nida'ul Hanifah and Mochammad Alwan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Maluku Utara 2023* (BPS Provinsi Maluku Utara, 2023), 9:3–4.

⁸ Suroya and Erdkhadifa, “Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022,” 192.

⁹ Suharnanik, *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran* (Surabaya: UWKS PRESS, 2023), 15.

merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.¹⁰ Berikut adalah tabel tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa Tahun 2019-2024.

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa Tahun 2019-2024

Tahun	Provinsi Pulau Jawa					
	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Banten	DI Yogyakarta	Jawa Barat	Jawa Timur
2019	6,22	4,44	8,11	3,14	8,04	3,82
2020	10,95	6,48	10,64	4,57	10,46	5,84
2021	8,50	5,95	8,98	4,56	9,82	5,74
2022	7,18	5,57	8,09	4,06	8,31	5,49
2023	6,53	5,13	7,52	3,69	7,44	4,88
2024	6,21	4,78	6,68	3,48	6,75	4,19

Sumber : Data bps.go.id (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di seluruh Provinsi Pulau Jawa mengalami naik turun selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, Banten menjadi yang tertinggi yaitu 8,11%, sedangkan Jawa Barat tertinggi kedua yaitu 8,04%.¹¹ Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di pulau jawa, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk bekerja yang mencari pekerjaan belum mendapat kesempatan yang sesuai sehingga meningkatkan angka pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran terbuka menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.¹²

¹⁰ *Ibid.*, 21.

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*, n.d., accessed November 14, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/>.

¹² Lidyawati Padang and Murtala Murtala, "Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *JURNAL EKONOMIKA INDONESIA* 9, no. 1 (November 2020): 5–7, <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i1.3167>.

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 10,46% meskipun terdapat Provinsi lain yang lebih tinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,95% dan Provinsi Banten 10,64%. Kondisi ini mencerminkan tekanan ketenagakerjaan yang serius di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Jawa Barat berada pada angka 9,82% lebih tinggi daripada Provinsi lainnya.¹³ Angka ini disebabkan oleh dampak dari pembatasan sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi sangat mempengaruhi pasar tenaga kerja, mempersempit kesempatan kerja, serta memperburuk kondisi ekonomi di wilayah tersebut.¹⁴

Memasuki tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat berada pada angka 8,31%, dilanjutkan pada tahun 2023 dengan angka 7,44% tertinggi kedua setelah Banten dengan angka 7,52%, dan di tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat di angka 6,75%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Banten sebesar 6,68% di tahun 2024, angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih menunjukkan dominasi sebagai Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Pulau Jawa.¹⁵ Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, serta ketidaksesuaian pilihan pendidikan dengan dinamika pasar tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan banyak rumah tangga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar

¹³ Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*.

¹⁴ Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, *Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja Dan Respons Kebijakan Di Kawasan Asia Dan Pasifik (Pendapat Akademis Penyusun)*, 2021, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/>.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)*.

dikarenakan hilangnya sumber pendapatan, sehingga sangat diperlukan upaya serius untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dan siap kerja.¹⁶

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk mencapai 50,4 juta jiwa pada semester awal 2024. Dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 26,19 juta jiwa, Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Meskipun pada tahun 2019, Jawa Barat merupakan yang tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Banten, besarnya angka pengangguran ini mencerminkan tekanan sosial ekonomi yang padat, sehingga berdampak pada kebijakan yang lebih langsung bagi jumlah populasi yang signifikan.¹⁷

Selain itu, Provinsi Jawa Barat menjadi rumah pusat industri dan jasa modern dan masih dominan pada sektor pertanian serta sektor perekonomian lainnya. Meskipun begitu, pengangguran terbuka masih menjadi isu yang dibahas di setiap daerah. Persyaratan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kualifikasi dengan kemampuan pencari kerja membuat pengangguran hingga saat ini masih banyak.¹⁸ Pengangguran, khususnya dikalangan anak muda yang belum terserap ke tenaga kerja akan menjadi beban bagi Negara. Kondisi ini menyebabkan bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi bagi Negara justru

¹⁶ Nita Fitriani, *Tingkat Pengangguran Di Jawa Barat Tertinggi Di Indonesia, Lulusan SMK Paling Rentan*, June 2025, <https://opendata.jabarprov.go.id/>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Agustus 2024*, November 2024, <https://bandungkab.bps.go.id/>.

¹⁸ Suroya and Erdkhadifa, "Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022," 193–94.

terabaikan, baik disebabkan oleh kemampuan yang kurang atau lapangan kerja yang minim.¹⁹

Peningkatan pengangguran terbuka di tahun 2019-2024 dapat berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan banyak keluarga yang kehilangan sumber penghasilan. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di kawasan industri juga memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengambil solusi finansial jangka pendek seperti pinjaman online, sehingga kondisi ini tidak hanya memperburuk kerentanan finansial tetapi juga meningkatkan resiko ketidakstabilan sosial dan masalah kesehatan mental di kalangan masyarakat yang terdampak.²⁰

Selain itu pengangguran terbuka juga berdampak pada tekanan pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dan beban pengeluaran untuk program bantuan sosial. Banyak perusahaan terutama perusahaan manufaktur yang melakukan relokasi ke Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan menghambat kesejahteraan jangka panjang masyarakat.²¹ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, terutama memperbaiki kualitas

¹⁹ Agnes Z. Yonatan, *Jawa Barat Jadi Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi 2024, Apa Solusinya?*, November 2024, <https://goodstats.id/article/>.

²⁰ Nurhadi, *2 Juta Orang Indonesia Pengangguran, Utang Pinjol Capai Rp874,5 Triliun!*, August 2024, <https://www.suara.com/2024/>.

²¹ Rolip Saptamaji, *Ancaman PHK Massal Buruh Dan Lonjakan Pengangguran Terbuka Di Jawa Barat*, May 2024, <https://kumparan.com/rolip-saptamaji/>.

sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendorong investasi di sektor yang akan menyerap tenaga kerja.

Ketidakpastian dan keterbatasan yang dihadapi pengangguran terbuka di Jawa Barat masih sering terjadi setiap tahunnya. Faktor utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Permasalahan ini semakin diperparah oleh kondisi pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar 0,5% tahun 2024 dibanding tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih lemah dan belum kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi.²² Teori Keynes menjelaskan bahwa permintaan efektif (*aggregate demand*) merupakan faktor penentu keseimbangan pendapatan nasional sehingga ketika pertumbuhan ekonomi melambat, permintaan agregat juga menurun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada rendahnya penyerapan tenaga kerja, sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran terbuka.²³

Permasalahan tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 berada di angka 64,99% kemudian naik di tahun 2024 sebesar 67,71%, kenaikan angkatan kerja ini tidak diringi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai.²⁴ Akibatnya, penyerapan tenaga kerja tidak optimal dan dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Teori Lewis dan Fei Ranis menjelaskan bahwa

²² Bima Bagaskara, *Pertumbuhan Ekonomi Jabar Melambat 0,5 Persen*, February 2025, <https://www.detik.com/jabar/>.

²³ Rudy C. Tarumingkeng, *Indikator Pertumbuhan Ekonomi* (Bogor: Rudyc e-Press, 2025), 2.

²⁴ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat Agustus 2024*.

peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Namun, jika penyerapan tenaga kerja di sektor modern tidak mampu mengimbangi arus migrasi, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja akan berdampak positif jika diiringi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai.²⁵

Faktor lainnya adalah kebijakan upah minimum yang dinilai dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja baru, terutama jika upah minimum ditetapkan lebih tinggi dari titik keseimbangan. Data menunjukkan pada tahun 2019 upah minimum sebesar Rp. 1.668.373, kemudian naik di tahun 2024 sebesar Rp. 2.057.495.²⁶ Menurut teori pasar kerja Neoklasik, tingkat upah dipandang dianggap sebagai harga tenaga kerja yang terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga menurunkan permintaan tenaga kerja, sementara penurunan upah akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.²⁷ Pemikiran malthus juga menjelaskan bahwa upah dipengaruhi oleh dinamika kependudukan, dimana peningkatan jumlah penduduk akan menambah penawaran tenaga kerja dan menekan tingkat upah, sedangkan penurunan jumlah penduduk

²⁵ Fitri Amalia et al., *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: CV. Widina Bhakti Persada, 2022), 173–74.

²⁶ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat*, 2025, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/daftar-upah-minimum-kabupatenkota-di-daerah-provinsi-jawa-barat>.

²⁷ Marissa Ulfa et al., *Sejarah Teori-Teori Ekonomi* (Cilacap: Media Pustaka Indo, 2025), 48.

akan membatasi penawaran tenaga kerja sehingga upah akan meningkat.²⁸

Tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Pendidikan berperan sebagai dasar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam menentukan kemampuan individu untuk memasuki dan bersaing di pasar kerja. Di mana pengangguran terbuka terjadi dialami oleh para remaja yang baru selesai menjalani pendidikan mereka di institusi pendidikan tinggi.²⁹ Data menunjukkan pada tahun 2019 tingkat pendidikan sebesar 8,37 menjadi 8,87 di tahun 2024.³⁰ Teori Human Capital menjelaskan bahwa investasi pendidikan adalah modal utama dalam meningkatkan kapasitas individu, setiap tambahan tahun pendidikan akan meningkatkan kemampuan kerja, produktivitas, dan penghasilan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki maka kemampuan dan keahlian yang dimiliki juga beragam, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.³¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat. Penelitian oleh Diar Muzna Tangke tahun 2023, yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh

²⁸ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 149.

²⁹ Ike Sugiarti and Rendra Erdkhadifa, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (April 2023): 2438, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3498>.

³⁰ Badan Pusat Statistik, *Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*, 2025, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/rata-rata-lama-sekolah-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>.

³¹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan* (Jakarta: FE UI, 2023), 141.

positif.³² Selanjutnya, penelitian oleh Annisa Qurrota Ayu tahun 2024, yang menunjukkan bahwa hanya rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan laju pertumbuhan PDRB yang berpengaruh negatif signifikan.³³ Penelitian oleh Windy Alifah Sahara tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat.³⁴ Penelitian oleh Eryan Okky & Kiky Asmara tahun 2024, yang menunjukkan bahwa upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh positif, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif.³⁵

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, pengangguran terbuka di Jawa Barat masih menjadi persoalan yang penting untuk segera diatasi, karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dengan menitikberatkan pada variabel – variabel utama yang menjadi instrumen kebijakan ketenagakerjaan

³² Diar Muzna Tangke, “Analisis Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Faktor Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku,” *Jurnal Ekonomi-Qu* 13, no. 1 (April 2023): 31, <https://doi.org/10.35448/jequ.v13i1.20529>.

³³ Annisa Qurrota Ayu and Sri Subanti, “Factors Affecting Open Unemployment Rate In Banten Province Using Panel Data Regression,” *Journal of Mathematics and Mathematics Education* 14, no. 01 (2024).

³⁴ Windy Alifah Sahara and Nelvia Iryani, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 9, no. 1 (June 2023): 28, <https://doi.org/10.35906/jep.v9i1.1387>.

³⁵ Okky Tegar Adinda and Asmara, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Gresik.”

dan pembangunan sumber daya manusia. Variabel–variabel tersebut berkaitan erat dengan fenomena tingginya angka pengangguran terbuka di Jawa Barat meskipun berbagai upaya sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan data tahun 2019-2024, yang mencakup periode sebelum pandemi, selama pandemi, dan masa pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel, yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua dimensi yaitu data *time series* dan data *cross section* sehingga dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tingginya angka tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 8,04%, kemudian melonjak di tahun 2020 menjadi 10,46% akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka menurun secara bertahap menjadi 9,82% di tahun 2021, 8,31% di tahun 2022, 7,44% di tahun 2023, dan 6,75% di tahun 2024. Meski mengalami penurunan, angka ini masih jauh diatas rata–rata nasional 4,91% dengan laju

pemulihan yang lambat, mengingat besarnya jumlah penduduk di Jawa Barat mencapai 50,4 juta jiwa. Tingginya tingkat pengangguran berdampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu nya adalah penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan pada penerimaan pajak daerah, serta relokasi beberapa perusahaan ke Jawa Tengah.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel dependen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat salah satu diantara variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024?

3. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024?
4. Apakah upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024?
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan salah satu diantara variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan upah terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

5. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran tertinggi Provinsi Jawa Barat, serta dapat menambah wawasan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada :

- a. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai materi kajian dan memperkaya wawasan ilmiah bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya pada bidang Ekonomi Syariah.

- b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam permasalahan di bidang perekonomian,

sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi dalam ruang lingkup penelitian.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian–penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengeksplorasi variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, atau dapat menerapkan pendekatan yang berbeda untuk memperdalam analisis dalam penelitian.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada menganalisis pengaruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat dengan periode 2019-2024.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja dalam suatu perekonomian pada periode tertentu, yang menggambarkan seberapa

besar kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Pengangguran dalam hal ini merujuk pada penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa peluangnya sangat kecil, sesuai dengan definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).³⁶ Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka digunakan sebagai indikator utama untuk melihat kondisi ketenagakerjaan sekaligus menilai seberapa efektif kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.³⁷

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB suatu periode ke periode lainnya. Dalam konteks makro, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator fundamental yang menggambarkan dinamika pembangunan dan kapasitas perekonomian suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah.³⁸

c. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi,

³⁶ Lestari Agusalm, *Perencanaan Ketenagakerjaan: Upaya Pengentasan Pengangguran di Provinsi Banten* (Bojonegoro: Madza Media, 2022), 35.

³⁷ Mankiw N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi ke-7)*, 7th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 132.

³⁸ Mulyaningsih, *Pembangunan Ekonomi* (Bandung: CV Kimfa Mandiri, 2019), 10–11.

baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja. Konsep ini mengukur besarnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia dan bersedia untuk berpartisipasi dalam proses produksi.³⁹

d. Upah minimum

Upah minimum didefinisikan sebagai imbalan dalam bentuk uang yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah dilakukan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dan keluarganya. Upah minimum bukan hanya sekadar harga tenaga kerja, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi upah rendah dan menjamin kesejahteraan minimum.⁴⁰

e. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan mengacu pada jenjang atau lamanya tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh individu, yang dalam konteks penelitian ini diukur menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Konsep ini mencerminkan akumulasi investasi dalam modal manusia (*human capital*) yang diharapkan dapat meningkatkan

³⁹ Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, *Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja Dan Respons Kebijakan Di Kawasan Asia Dan Pasifik (Pendapat Akademis Penyusun)*.

⁴⁰ Nindry Sulistya Widiastiani, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Sleman: PT Kanisius, 2022), 47–56.

pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja di pasar kerja.⁴¹

2. Definisi Operasional

a. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran dalam hal ini mencakup penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁴² Pengangguran terbuka merupakan kondisi paling serius karena menggambarkan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan dapat diukur secara langsung dan objektif, sehingga digunakan sebagai indikator resmi kondisi ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dapat dirumuskan:⁴³

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai persentase tahunan Laju

⁴¹ Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia & Ketenagakerjaan*, 141.

⁴² Muhammad Fahreza and Sulfaidah, *Pengantar Ekonomi Makro* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 135.

⁴³ Mardiyah Muhgni, Ferdian Fadly, and Arisman Adnan, *Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Sumatera Dengan Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline*, 6, no. 1 (2020).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. dapat dirumuskan:⁴⁴

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

c. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk usia kerja, dapat dirumuskan:⁴⁵

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

d. Upah minimum

Upah minimum dioperasionalkan sebagai upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, dapat dirumuskan:⁴⁶

$$UM_{t+1} = UM_t + (UM_t (\alpha \times \Delta I \times \beta \times \Delta P))$$

⁴⁴ Widia Wardani et al., *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 11.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, *Booklet Sakernas Februari 2025*, July 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/14/90a6b20c25c63176d23ab46c/booklet-sakernas-februari-2025.html>.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021,” n.d., accessed November 16, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

e. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan diukur menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dialami oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal, dapat dirumuskan:⁴⁷

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

Pada bagian awal dalam penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto hidup, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi atau utama penelitian ini, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran singkat dan menjabarkan beberapa subab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan penegasan istilah dan sistematika penelitian skripsi.

⁴⁷ Siti Sofiah, *Indikator Pendidikan Di Indonesia Tahun 2015/2016* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini menjabarkan teori dan konsep yang diperoleh dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, pada bab ini juga memaparkan kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini memberikan gambaran yang meliputi objek penelitian, gambaran hasil penelitian, dan analisis data melalui uji pemilihan terbaik, uji analisis model data panel, uji asumsi klasik, hingga uji hipotesis.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari suatu penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori dan penelitian terdahulu yang didapat.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi tentang rangkuman hasil pembahasan penelitian.

Sementara untuk saran berisi tentang pendapat yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait, agar lebih baik kedepannya

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran–lampiran, surat pernyataan, dan riwayat hidup.